

SINERGITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN IPM DI JAWA BARAT*

Hady Sutjipto**

Abstrak

Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolok ukur pelaksanaan pembangunan. Memperhatikan Properda Jawa Barat Tahun 2003-2007, pencapaian IPM Jawa Barat masih di bawah target. Rendahnya pencapaian ini, terutama disebabkan oleh tidak tercapainya target daya beli. Pada aspek ekonomi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat dan realisasi investasi meningkat, namun angka kemiskinan dan pengangguran masih cukup tinggi. Saat ini, di Jawa Barat, terdapat Badan Amil Zakat dan berkembang fenomena tampilnya lembaga-lembaga amil zakat, yang mampu mengorganisasikan dana zakat, infaq dan sodaqoh yang dihimpunnya, untuk membantu kaum dhuafa dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan IPM di Jawa Barat, perlu menciptakan sinergitas pembangunan daerah antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antartingkat pemerintahan, serta menciptakan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah yang melibatkan peranan Badan Amil Zakat serta Lembaga Amil Zakat

Kata Kunci : IPM, Sinergitas Pembangunan Daerah, Peranan BAZ dan LAZ

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan Jawa Barat, telah ditetapkan bersama target kinerja pembangunan Jabar sampai tahun 2008, yakni akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang secara kuantitatif diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

* Naskah Pemenang Juara Harapan II Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Dosen Unisba TA. 2006/2007

** **Hady Sutjipto, SE.,M.Si.**, adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Uniba

IPM merupakan tolok-ukur yang disepakati bersama, antara eksekutif dan DPRD Jawa Barat, untuk menilai sejauhmana pembangunan di Jawa Barat berjalan. IPM yang mendasarkan kepada Indeks Pendidikan (IP), Indeks kesehatan (IK), serta Indeks Daya Beli (IDB) menjadi instrumen untuk melihat perkembangan pembangunan daerah.

Visi pembangunan Jawa Barat, adalah melakukan akselerasi pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam visi tersebut terkandung pengertian, bahwa pendekatan pembangunan Jawa Barat bukan hanya menekankan aspek pertumbuhan atau pemerataan, melainkan proses perubahan pembangunan yang menekankan aspek percepatan dalam bidang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Jawa Barat.

Pengembangan pendekatan percepatan pembangunan ini, dilandasi oleh: (a) kesenjangan antardaerah kabupaten/kota di Jawa Barat, (b) kesenjangan antara Provinsi Jawa Barat dengan provinsi lain di Indonesia, (c) kesenjangan antara proses pembangunan Jawa Barat (atau nasional) dengan kota-kota lain di luar negeri, serta (d) kesenjangan antara rencana/target dengan hasil-hasil pembangunan. Dengan adanya kondisi tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengembangkan konsep akselerasi pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Bapeda Provinsi Jawa Barat 2005)

Untuk mewujudkan cita-cita sebagai provinsi termaju pada tahun 2010, Jabar menetapkan IPM mencapai angka 80. Sepanjang tahun 2003-2005, perkembangan indikator makro pembangunan Jawa Barat, khususnya dalam Indeks Pembangunan Manusia, tidak terlepas dari keberhasilan upaya peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia Jawa Barat, yang telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan. Indeks Pendidikan Jawa Barat, pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan, sebesar 1,19 poin. Selama tahun tersebut, terjadi pergerakan indeks yang positif dari angka 78,40 menuju angka 79,59. Pergerakan angka indeks pendidikan yang menggembirakan ini, secara umum, sangat dipengaruhi oleh kenaikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk Jawa Barat.

Sementara itu, untuk Indeks Kesehatan sampai dengan tahun 2005, adalah sebesar 69,28, atau meningkat sebesar 2,71 poin, dibandingkan tahun 2003. Meskipun laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami

peningkatan, namun belum memberikan implikasi yang signifikan terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Sampai dengan akhir tahun 2005, indeks daya beli Jawa Barat hanya meningkat 0,55 poin dibandingkan tahun 2003, yaitu dari 58,63 menjadi 59,18.

Pada aspek ekonomi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat pada tahun 2005, sebesar 5,31%, menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2004, sebesar 5,08%, dan tahun 2003 sebesar 4,39%. Adapun perkembangan realisasi investasi PMA/PMDN menunjukkan angka yang menggembirakan, yaitu, pada tahun 2005, sebesar 61,44 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2004 sebesar 40,52 triliun rupiah, dan tahun 2003 sebesar 36,51 triliun rupiah. Jumlah investasi yang terus berkembang ini, memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama periode 2003-2005. Hal ini mengindikasikan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat.

Perkembangan indikator makro pembangunan Jawa Barat tahun 2003-2005 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.1 di halaman berikut.

Namun, yang perlu dicermati adalah bahwa meningkatnya LPE ini tidak serta merta memberi efek yang merata bagi kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Hal ini sebagai akibat disparitas antarkelompok masyarakat yang begitu besar dalam aktivitas ekonomi regional yang terjadi. Demikian pula meningkatnya laju investasi di Jawa Barat tidak serta merta memberi efek yang signifikan terhadap perkembangan aspek sosial ekonomi kemasyarakatannya. Hal ini lebih disebabkan mekanisme bagi hasil dan pemanfaatan kegiatan investasi yang kurang optimal, sehingga investasi yang ditanamkan belum memberikan daya dorong yang signifikan terhadap produktivitas.

Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kemiskinan penduduk Jawa Barat, yaitu, pada tahun 2003, sebesar 2.664.478 KK (10.125.016 jiwa) meningkat menjadi 2.671.593 KK (10.152.053 jiwa), atau 25,94 % dari jumlah penduduk sebesar 39.140.812 jiwa (**BKKBN Jawa Barat 2005**). Jumlah pengangguran (pengangguran terbuka), menurut Suseda (2005), menunjukkan angka yang masih tinggi, yaitu, 2.158.156 jiwa, tahun 2003, dan tahun 2005 sebesar 2.029.082 jiwa. Angka kemiskinan dan pengangguran ini pasti akan bertambah dari dampak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bulan Maret dan Oktober 2005.

Tabel 1.1
Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun
2003 -2005

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2003	2004	2005
1	IPM **)	67,87	68,36	69,35
2	Indeks Pendidikan	78,40	79,02	79,59
	<i>Angka Melek Huruf (%)</i>	93,60	93,96	94,52
	<i>Rata-rata Lama Sekolah (tahun)</i>	7,20	7,37	7,46
3	Indeks Kesehatan	66,57	67,23	69,28
	<i>Angka Harapan Hidup (tahun)</i>	64,94	65,34	66,57
4	Indeks Daya Beli	58,63	58,83	59,18
	<i>Purchasing Power Parity (Rp)</i>	553.699,00	554.570,00	556.100,00
5	Laju Pertumbuhan Penduduk(%)	2,25	2,64	2,10
6	Penduduk Miskin (%)	27,81	27,51	28,29
7	Pengangguran (%)	12,69	12,25	11,91
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)	4,39	5,08	5,31
9	Jumlah Investasi (Trilyun Rp)	36,51	40,52	61,44

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, diolah Bapeda Provinsi Jawa Barat

Keterangan :

****)** *Angka Regional Jawa Barat (tidak dapat dibandingkan dengan Provinsi lain, karena asumsi Purchasing Power Parity yang berbeda)*

Persoalan penanggulangan kemiskinan tampaknya merupakan beban pembangunan manusia yang sangat berat di Indonesia, termasuk di Jawa Barat.. Berbagai langkah, program, dan kegiatan ke arah penanggulangan

kemiskinan terus dilakukan, namun belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Masalah sinergitas, hingga saat ini masih menjadi kendala dalam proses pembangunan Jabar, terutama dalam pelaksanaan agenda akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, guna mendukung pencapaian visi Jabar 2010. Orientasi sektoral, maupun orientasi kedaerahan, yang kurang mengindahkan aspek-aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas, tampaknya masih kuat di dalam perilaku dan budaya organisasi. Hal itu berdampak pada hasil pelaksanaan program yang kurang optimal.

Salah satu dari misi dan visi Jawa Barat yang didengung–dengungkan adalah kesalehan sosial. Realisasi tanda kesalehan sosial adalah memberdayakan ZIS bagi kepentingan umat yang masih kekurangan. Saat ini, di Jawa Barat terdapat Badan Amil Zakat di tingkat pemerintahan, di samping itu berkembang fenomena tampilnya lembaga-lembaga amil zakat, yang mampu mengorganisasikan dana zakat, infaq dan sodaqoh yang dihimpunnya, untuk membantu kaum dhuafa dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Setiap tahun, lembaga zakat se–Indonesia baru bisa menggali ZIS Rp 600 miliar, padahal potensi ZIS Rp 7,5 triliun. Sedangkan Jawa Barat, potensi zakatnya Rp 300 miliar, atau dua kali lipat Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Pikiran Rakyat , 16/5/2006).

Berdasarkan fenomena tersebut, pembangunan di Jawa Barat, perlu memperhatikan kondisi dan potensi daerah, nasional dan tantangan global. Pada sisi lain, pembangunan Jawa Barat juga perlu memperhatikan kepaduan antara kebijakan nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Latar belakang pemikiran tersebut, menuntut pentingnya upaya pembangunan yang bersifat sinergis dan upaya mencari alokasi sumber daya pembangunan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang oleh penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana menciptakan sinergitas pembangunan daerah antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antartingkat pemerintahan ?
2. Bagaimana peranan BAZ, dan LAZ dalam menciptakan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui :

1. Penciptaan sinergitas pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan .
2. Peranan BAZ dan LAZ, BAZ, dan LAZ dalam menciptakan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah .

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Sebagai masukan bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat guna mengambil langkah-langkah kebijakan dalam memecahkan permasalahan kemiskinan dan peningkatan IPM di Jawa Barat
2. Sebagai masukan informasi bagi masyarakat dalam menyikapi permasalahan kemiskinan dan peningkatan IPM
3. Sebagai masukan bagi akademisi dan praktisi untuk melakukan kajian dan penelitian yang relevan, untuk berkontribusi memberikan solusi terhadap permasalahan kemiskinan dan peningkatan IPM di Jawa Barat, guna pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat di masa mendatang

1.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah deskriptif analitis, sedangkan pendekatannya bersifat kualitatif dan kuantitatif (*qualitative and quantitative approach*). Data-data yang dikumpulkan dalam tulisan ini, berupa data sekunder (*secondary data*), dan diperoleh melalui berbagai referensi yang relevan (*relevant reference*) dengan permasalahan dan kajian yang diangkat.

2 Tinjauan Pustaka

Pembangunan merupakan manifestasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya yang sistematis. Pembangunan manusia, menurut UNDP (1990), merupakan model pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia, yaitu, meningkatnya derajat

kesehatan, pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan pembangunan manusia dalam konteks Indonesia, yaitu pembangunan manusia seutuhnya, mempunyai perspektif yang luas karena tidak saja mencakup aspek fisik biologis (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), dan aspek kesejahteraan ekonomi (konsumsi per kapita) semata tetapi juga aspek lainnya.

Menurut Todaro (2004), meskipun indeks pembangunan manusia memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pembangunan manusia, ia memberikan pendapat sebagai berikut :

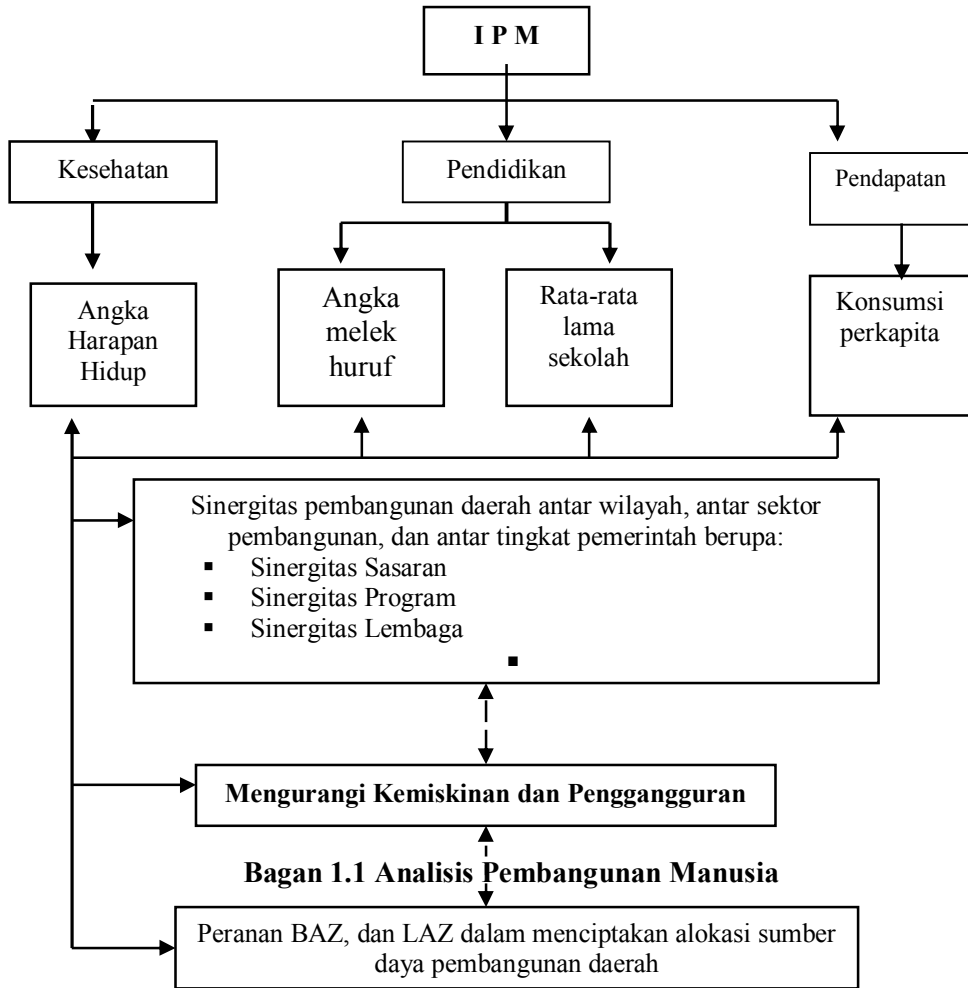
1. Pembentukan Human Development Indeks (HDI) sebagian didorong oleh strategi politik yang memfokuskan perhatian pada aspek pembangunan kesehatan dan pendidikan
2. Indikator politik, kesehatan, pendidikan merupakan indikator yang bagus namun bukan ideal
3. Nilai Human Development Indeks (HDI) suatu negara mungkin membawa dampak yang kurang menguntungkan karena mengalihkan fokus dari masalah ketidakmerataan dalam negara tersebut .
4. Alternatif pendekatan yang memandang rangking GNP per kapita kemudian di lengkap dengan indikator sosial lain.
5. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator yang “relatif”, bukan absolut, sehingga bila semua negara mengalami peningkatan pada tingkat tertimbang yang sama, maka negara miskin tidak akan memperoleh penghargaan atas kemajuannya .

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan, dan tanpa, mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, yang biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Di negara-negara maju, kemiskinan relatif diukur sebagai suatu proporsi, dari tingkat pendapatan rata-rata perkapita. Sebagai suatu ukuran relatif, kemiskinan relatif dapat berbeda menurut negara, atau periode, di dalam suatu negara. Kemiskinan absolut adalah derajat dari kemiskinan, di mana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat dipenuhi. Ini adalah suatu ukuran

tetap (tidak berubah) di dalam bentuk suatu kebutuhan kalori minimum ditambah komponen-komponen non makanan yang juga sangat diperlukan untuk bertahan hidup (Tulus Tambunan, 2003:84)

Kemiskinan tersebut merupakan dilema dengan beragam penyebab dan konsekuensi. Kondisi sumber daya alam, seperti rendahnya kesuburan tanah, kekurangan air akibat rendahnya curah hujan dengan pola distribusi curah hujan yang tidak menentu, terbatasnya akses terhadap lahan beririgasi, dan gangguan hama penyakit tanaman, merupakan kendala serius yang dihadapi penduduk. Di samping faktor-faktor alam tersebut, kelangkaan modal yang mudah diakses bagi penduduk miskin maupun pengusaha mikro dan kecil-menengah (UMKM), serta terbatasnya akses terhadap lahan yang produktif, kurangnya infrastruktur fisik dan sosial, kurangnya akses terhadap pelayanan dan informasi, serta beberapa faktor sosial budaya masyarakat, adalah faktor-faktor penting yang membatasi masyarakat miskin maupun masyarakat lainnya yang bergerak dalam sektor usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan sosial.

Sementara itu, meskipun otonomi daerah, yang diimplementasikan semenjak awal 2001 di Indonesia, telah memperluas ruang partisipasi politik kepada rakyat dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan, ketimpangan ekonomi dan sosial masih merupakan realita yang belum terpecahkan sampai sekarang. Otonomi daerah memang merupakan prasyarat penting menuju perbaikan dan pemerataan kesejahteraan rakyat, tetapi itu saja tidak cukup. Untuk sampai kepada tujuan-tujuan tersebut, diperlukan politik ekonomi yang secara konsisten memihak kepada sektor ekonomi rakyat disertai strategi yang kompak (*coheren*) untuk menunjang integrasi masyarakat miskin ke dalam usaha produktif dan pasar.



3 Pembahasan

3.1 Penciptaan sinergitas pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan

Pencapaian visi Jawa Barat tidak hanya menjadi beban pemerintah saja, tapi seluruh komponen masyarakat Jawa Barat. Untuk menerapkan konsep IPM, Pemprov harus mempersiapkan secara baik program-program yang akan diluncurkan, merangkul pemerintah kabupaten/kota dan elemen masyarakat.

Konsekuensinya, Pemprov harus mau memikul beban lebih besar dibandingkan pemerintah kabupaten/kota dan elemen masyarakat. Namun di atas semua itu, yang lebih penting adalah, bagaimana upaya menumbuhkan kepercayaan bahwa dengan mengimplementasikan konsep IPM, kabupaten/kota dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menumbuhkembangkan BAZ dan LAZ.

Apalagi di tengah masyarakat yang patrilineal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai fasilitator, regulator dan dinamisator harus memberikan contoh bagaimana mengimplementasikan konsep IPM di Jawa Barat secara sungguh-sungguh.

Perlu disimak, bahwa pemikiran untuk menempatkan pembangunan manusia sebagai hal yang utama tidak berarti kita harus mengabaikan, apalagi menafikan sama sekali arti pentingnya pembangunan lain. Yang benar adalah, saatnya kini semua aspek pembangunan lain, sebutlah semisal pembangunan jalan dan sejenisnya, semuanya mesti ditujukan dalam rangka mempercepat tercapainya pembangunan manusia. Di situlah arti pentingnya membangun sinergi, baik antara pusat dengan daerah, maupun antar sektor pembangunan yang ada di daerah..

Sebagai ilustrasi, prioritas pembangunan Jawa Barat 2006 diarahkan dalam rangka menjawab isu strategis yang diprediksi muncul serta dalam upaya memperbaiki kinerja pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terdapat 10 (sepuluh) prioritas pembangunan yang menjadi perhatian utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Provinsi untuk tahun 2006, yaitu :

1. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin.
2. Memanfaatkan sumberdaya ekonomi lokal secara optimal
3. Menyempurnakan pelayanan investasi

4. Meningkatkan daya saing usaha koperasi serta usaha kecil dan menengah
5. Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur wilayah
6. Mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah
7. Memantapkan pranata pembangunan daerah
8. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
9. Meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi
10. Memperbaiki daya dukung lingkungan

Keberadaan penduduk miskin yang cukup besar di Jawa Barat merupakan salah satu faktor yang menghambat akselerasi pencapaian IPM 80 tahun 2010. Penduduk miskin terutama menghadapi kesulitan untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang disebabkan oleh rendahnya daya beli. Pada sisi lain, penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan.

Persoalan penanggulangan kemiskinan tampaknya merupakan fokus perhatian pemerintah. Program-program yang bersifat langsung, mulai dari program Jaring Pengaman Sosial, dana bergulir, dana pembangunan desa, dan sebagainya terus digulirkan. Banyak lagi program pembangunan dan bantuan lainnya, termasuk yang bernuansa *charity* seperti: BOS, Raskin dan terakhir Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, jumlah penduduk miskin, seperti yang telah banyak diulas oleh media massa, cenderung bertambah.

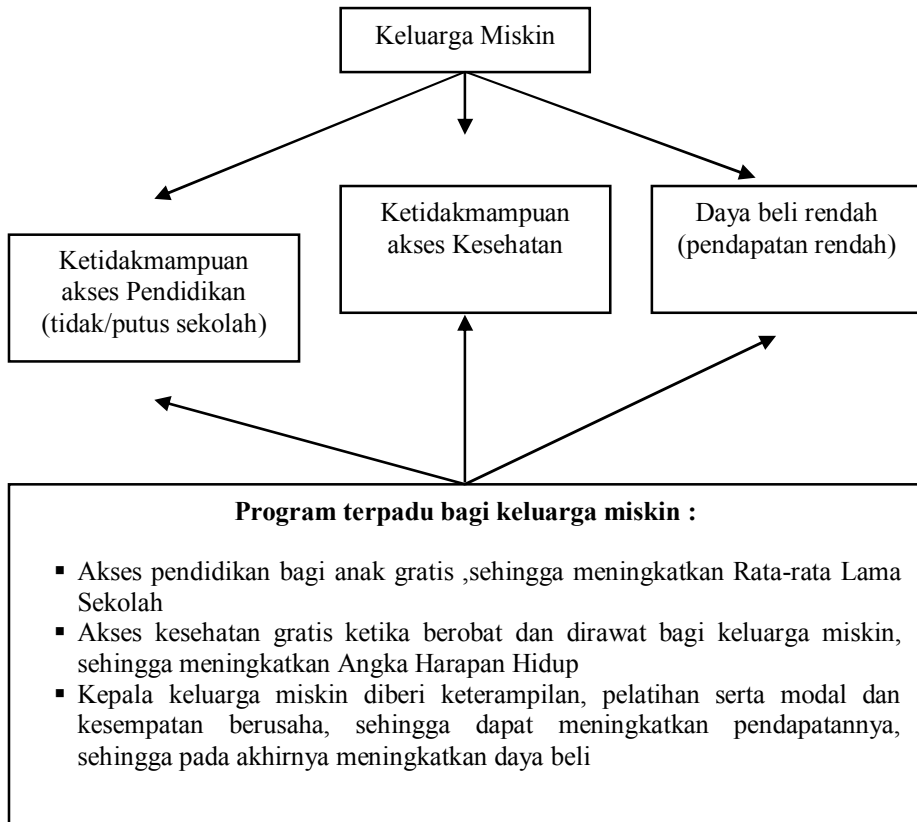
Dalam konteks pembangunan Jawa Barat, harus diupayakan adanya sinergitas pembangunan daerah antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antartingkat pemerintahan. Pendekatan sinergis yang dimaksud, yaitu, adanya keterpaduan antara satu dengan yang lain, baik dari sisi sasaran, program maupun kelembagaan, dalam memberdayakan kelompok masyarakat Jawa Barat. Artinya, upaya pembangunan ini diorientasikan untuk memberdayakan kualitas kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan dalam angka partisipasi sekolah, daya beli, dan kesehatan.

Sinergitas sasaran, yaitu adanya upaya terpadu dalam mengentaskan kelompok masyarakat miskin di suatu wilayah yang memiliki resiko

pembangunan paling tinggi, yaitu, resiko pendidikan, daya beli, dan kesehatan. Sinergitas program, yaitu, bentuk program atau jenis kegiatan yang mengandung nilai kepaduan dalam mengentaskan kelompok sasaran yang memiliki resiko pembangunan paling tinggi. Sinergitas kelembagaan, yaitu adanya upaya terpadu, baik dalam bentuk personal maupun keuangan, antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, yang memiliki orientasi pembangunan terhadap kelompok sasaran yang memiliki resiko pembangunan paling tinggi.

Upaya untuk membangun sinergitas ini, dilandaskan pada dua pendekatan, yaitu, sinergitas horisontal dan sinergitas vertikal. Sinergitas horisontal, yaitu, adanya kepaduan antara upaya peningkatan daya beli, partisipasi sekolah, dan kesehatan. Sedangkan, sinergitas vertikal, yaitu adanya kepaduan strategis antara kebijakan pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, prioritas pembangunan yang diturunkan dalam bentuk program-program kegiatan, seyogyanya difokuskan untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan dan daya beli bagi keluarga miskin. Dinas sektoral yang terkait (misalnya: Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kesehatan, dll), semua programnya harus sinergis dan bersama-sama untuk mengentaskan pada keluarga miskin. Sehingga, apabila sebuah keluarga miskin dari aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan mendapat perhatian bersama, maka diharapkan akan meningkatkan angka IPM. Untuk itu, program bersama tersebut diarahkan pada satu kawasan (misalnya kecamatan atau kelurahan yang memiliki banyak keluarga miskin)



3.2 Peranan BAZ dan LAZ dalam menciptakan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah .

Perkembangan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) di Indonesia semakin menunjukkan peningkatan yang berarti, baik dari segi penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, maupun pertanggungjawaban. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat pun semakin meningkat. Masyarakat semakin menunjukkan keyakinan bahwa dana ZIS ini memiliki

potensi untuk mengentaskan problematika kemiskinan yang saat ini tengah dihadapi bangsa Indonesia

Penelitian PIRAC menyebutkan, potensi zakat Indonesia sebesar Rp 20 triliun per tahun belum seluruhnya terserap. Untuk Kota Bandung, penyerapan zakat tahun lalu oleh Rumah Zakat Indonesia Dompot Sosial Ummul Quro (RZI DSUQ) sebesar Rp 8,2 miliar, sementara dari tingkat nasional Rp 23,5 miliar. Itu belum seberapa dibandingkan dengan potensi zakat. Dengan adanya kartu donatur, diharapkan tahun ini dapat terserap zakat Rp 42 miliar (PR 23/10/2005).

Kita pun melihat bahwa keberadaan lembaga zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), memiliki peran dan kontribusi yang sangat signifikan di dalam penanganan masalah kemiskinan. Dapat dikatakan, bahwa kinerja BAZ dan LAZ cukup optimal sehingga dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, meskipun jumlah dana bantuan yang diberikan masih sangat sedikit dan terbatas.

Keterbatasan pemerintah dalam pendanaan pembangunan yang berkaitan pencapaian target IPM ini, seharusnya, semakin menyadarkan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk senantiasa berupaya menjadikan pengembangan ZIS sebagai agenda nasional. Tanpa adanya dukungan kuat dari pemerintah dan DPR, maka instrumen ZIS ini tidak akan tumbuh secara cepat dan kuat.

Keberadaan BAZ dan LAZ dapat berperan dalam memberikan bantuan permodalan bagi masyarakat miskin dalam bentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Diharapkan dengan program kemitraan dapat meningkatkan kinerja UMKM yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan daya beli masyarakat sebagai salah satu tolok ukur pemerataan pendapatan.

Program kemitraan BAZ dan LAZ dengan UMKM dapat berupa pemberian pinjaman dalam bentuk pinjaman modal kerja, atau dalam bentuk hibah berupa bantuan pendidikan, dan pelatihan, serta pendampingan. Prioritas program kemitraan ditujukan terutama bagi usaha kecil yang belum memiliki kemampuan akses perbankan, dan yang tidak memiliki kaitan usaha maupun yang memiliki kaitan usaha, dengan BAZ dan LAZ, namun diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha.

BAZ dan LAZ dapat juga berperan dalam program bina lingkungan yang meliputi : bantuan pendidikan dan atau pelatihan, yaitu, bantuan yang

diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); bantuan peningkatan kesehatan, yaitu, bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; dan bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, yaitu, bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat.

Dengan program kemitraan dan bina lingkungan ini, BAZ dan LAZ bisa lebih berperan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Hal ini, pada akhirnya, akan membantu pemerintah daerah dalam mencapai target IPM.

4 Kesimpulan

4.1 Kesimpulan

1. Dalam konteks pembangunan Jawa Barat, harus diupayakan adanya sinergitas pembangunan daerah antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antartingkat pemerintahan. Pendekatan sinergis yang dimaksud, yaitu adanya kepaduan antara satu dengan yang lain, baik dari sisi sasaran, program maupun kelembagaan, dalam memberdayakan kelompok masyarakat Jawa Barat. Program-program yang berkaitan dengan aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, harus difokuskan pada keluarga miskin pada wilayah daerah tertentu.
2. Keterbatasan pemerintah daerah dalam pendanaan pembangunan yang berkaitan pencapaian target IPM ini, maka peranan BAZ dan LAZ dapat membantu dalam upaya peningkatan IPM dengan program kemitraan dan bina lingkungan.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, maka sumbang saran dalam menciptakan sinergitas pembangunan daerah dalam meningkatkan IPM di Jawa Barat, di antaranya sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah perlu membuka dialog untuk melihat kembali sejauhmana kebijakan-kebijakan yang ada sekarang konsisten dengan prinsip-prinsip pro-masyarakat miskin dan pembangunan berkelanjutan dalam upaya pencapaian target IPM.

2. Pemerintah perlu mengembangkan strategi pengentasan kemiskinan dengan kerjasama yang sinergis terutama dalam program kerjanya antara pemerintah pusat dengan pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta melibatkan kemitraan BAZ dan LAZ
3. Perlu gerakan penyadaran umat Islam untuk mengeluarkan ZIS yang masih terbilang rendah akibat pemahaman yang salah dengan menganggap membayar ZIS akan mengurangi hartanya. Padahal, apabila dana masyarakat terutama ZIS bisa dioptimalkan, jelas dapat memecahkan masalah kemiskinan

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida.2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Penerbit Ghalia Indonesia
- Arah dan Kebijakan Umum (AKU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (APBD) Propinsi Jawa Barat Tahun 2006
- Bank Indonesia.2006. *Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Provinsi Jawa Barat. Triwulan II-2006*.
- Basri,Faisal.2002. *Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*. Penerbit Erlangga
- Harian Umum Pikiran Rakyat, berbagai edisi
- Kementerian Negara BUMN.2006. *BUMN dan Kedudukan Hukumnya serta hubungannya dengan Keuangan Negara*
- Michael,Todaro P. and Stephen C. Smith.. 2004. *Economic Development*.Eight Edition.
- Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat tahun 2005
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Jawa Barat Tahun 2006. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- Statistik Jawa Barat, Badan Pusat Statistik
- Sukirno, Sadono. 2003. *Ekonomi Pembangunan. Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan*. LPUI Jakarta Press.
- Tambunan.Tulus.2003.*Perekonomian Indonesia:Beberapa Masalah Penting*.Penerbit Ghalia Indonesia.